

# PERAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TIMUR DALAM PELAYANAN DAN PENYEDIAAN INFORMASI PUBLIK

Muhammad Fauzi Wibowo

Jurusan Ilmu Komunikasi

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

[muhammadfauziwibowo@gmail.com](mailto:muhammadfauziwibowo@gmail.com)

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Pelaksana Tugas (PPID) Kantor Komunikasi dan Teknologi Informasi dalam Layanan Provinsi Jawa Timur dan Penyediaan Informasi Publik. Maka untuk menjawab rumusan masalah di atas penelitian ini menganalisis peran PPID Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur terhadap informasi publik kepada publik. Dalam penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah teknik wawancara mendalam kepada informan yaitu Kepala Departemen (Atasan PPID), Kepala Layanan Informasi (Sekretaris PPID), Kepala Biaya Pengembangan TIK (Anggota PPID) Departemen Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Timur, dan masyarakat yang terdiri dari mahasiswa dan pengusaha. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa peran Departemen Komunikasi dan Informasi PPID Provinsi Jawa Timur dalam layanan dan penyediaan informasi publik sejauh ini mencapai beberapa hasil yang cukup baik dan memuaskan. Ini dibuktikan pada tahun 2015, Departemen Komunikasi dan Informasi PPID Provinsi Jawa Timur kini berada di peringkat kedua di tingkat nasional. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa Departemen Komunikasi dan Informasi PPID Provinsi Jawa Timur telah melakukan peran, tugas dan fungsi sebagai badan publik yang independen. Selain itu, ada saran dari masyarakat sebagai bahan studi untuk evaluasi masa depan Departemen Komunikasi dan Informasi PPID Provinsi Jawa Timur. Saran yang disajikan dalam penelitian ini adalah Departemen Komunikasi dan Informasi PPID Provinsi Jawa Timur, yaitu agar dapat melebarkan sayapnya ke jejaring media sosial sehingga pengguna media sosial juga memahami dan menghargai peran, tugas, dan fungsi PPID Departemen Komunikasi dan Informasi Departemen Provinsi Jawa Timur sendiri.

**Kata kunci:** Peran, PPID, Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Timur, Layanan dan Penyediaan Informasi Publik.

**Abstract.** *This study aims to determine how the role of Acting Manager (PPID) Office of Communications and Information Technology in the Service of East Java province and Provision of Public Information. So to answer the problem formulation above this study to analyze the role of PPID Communications and Information Department of East Java Province to public information to the public. In this study conducted using qualitative approach with descriptive qualitative research methods. While data collection techniques used by researchers is the technique of in-depth interview to the informant that the Head of Department (Tops PPID), Head of Information Services (Secretary PPID), Head of Development Charge of ICT (Member PPID) Communications and Information Department of East Java Province, and*

*society consisting of university students and entrepreneur. The results of this study explained that the role of PPID Communications and Information Department of East Java Province in services and the provision of public information have so far achieved some pretty good results and satisfactory. This is evidenced in 2015, PPID Communications and Information Department of East Java Province is now ranked second in the national level. The conclusion from this study that PPID Communications and Information Department of East Java Province has done the role, duties and functions as an independent public body. In addition, there are suggestions from the community as study materials for the evaluation of future PPID Communications and Information Department of East Java Province. Suggestions presented in this study is PPID Communications and Information Department of East Java Province, namely in order to spread its wings into social media networks so that social media users also understand and appreciate the role, duties and functions of the PPID Communications and Information Department of East Java Province itself.*

**Keywords:** *Role, PPID, Communications and Information Agency of East Java Province, Services and Provision of Public Information*

## PENDAHULUAN

Keterbukaan dan transparansi informasi pada badan publik diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Petunjuk pelaksanaan UU KIP dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hal ini disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mempersiapkan semua infrastruktur yang berkaitan dengan hal tersebut, yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan semua ketentuan yang ada tersebut, bisa dilihat bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) ini mempunyai peran yang sangat vital dalam penyelenggaraan pelayanan maupun dalam hal penyediaan informasi dalam kerangka implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sehingga berdasarkan hal tersebut, dalam penelitian ini penulis ingin melihat dan mendalami sejauh mana peran dan fungsi PPID ini bisa berjalan sesuai dengan ketentuan, khususnya pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur yang secara *ex-officio* menunjuk sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Oleh karenanya, untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, baik badan publik di tingkat pusat maupun daerah dituntut untuk berkomitmen tinggi dalam melaksanakan undang-undang ini demi terciptanya praktik demokratisasi dan *good governance*. Karena pada dasarnya, konteks lahirnya UU KIP ini secara substansial bertujuan untuk memberikan jaminan konstitusional agar praktik demokratisasi dan *good governance* bermakna bagi proses pengambilan kebijakan terkait kepentingan publik, yang

bertumpu pada partisipasi masyarakat maupun akuntabilitas lembaga penyelenggara kebutuhan publik.

Di dalam kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Dinas Komunikasi Provinsi Jawa Timur nampak belum memperlihatkan hasil yang memuaskan baik dalam hal sosialisasi kepada publik maupun terkait dengan program kerja yang dilakukan. Hal inlay yang menjadi pekerjaan rumah bagi PPID di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur yang bertugas untuk memberikan, menyediakan, mengelola, dan melayani informasi publik khususnya mengenai program kerja Pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Dari uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis mengambil judul penelitian tentang "Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur dalam Pelayanan dan Penyediaan Informasi Publik."

## METODOLOGI PENELITIAN

### Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*) yang menghasilkan data berupa kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Wawancara takterstruktur bersifat luwes, susunan pernyataan dan susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat wawancara. Pertanyaan untuk wawancara secara mendalam akan berkembang sesuai pertanyaan dari *informan*. Karena teknik pengumpulan data menggunakan *in-depth interview* yang memiliki sifat yang luwes, susunan pertanyaan dan susunan kata-kata akan setiap pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat wawancara.

Teknik ini dinilai paling sesuai, karena hal tersebut memungkinkan pihak yang diwawancarai untuk mengidentifikasi diri sendiri dan lingkungan untuk menggunakan istilah-istilah mereka sendiri mengenai fenomena-fenomena atau peristiwa yang diteliti, tidak sekadar menjawab pertanyaan (Mulyana, 2001:180-183).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Tugas dan Fungsi PPID

PPID mempunyai tugas yaitu melaksanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan satuan kerja. Adapun fungsi dari PPID yaitu:

- mengelola dan melayani informasi publik serta dokumentasi di satuan kerjanya;
- pengolahan, penataan, dan penyimpanan data dan/atau informasi publik yang diperoleh di satuan kerjanya;
- penyeleksian dan pengujian datadan informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik;

- penyelesaian sengketa pelayanan informasi;
- pelaksanaan koordinasi antar bidang dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.

### **Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur dalam Pelayanan dan Penyediaan Informasi Publik**

Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur dalam pelayanan dan penyediaan informasi publik sejauh ini dalam koridor dan hasil yang cukup bagi kalangan internal dan eksternal. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur sebagai berikut: *“Sebagaimana Komisi Informasi Pusat setiap tahun yang menilai kinerja badan publik di provinsi. Yang dinilai adalah kepatuhan terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008. Tahun 2015 kemarin, PPID Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur mendapat peringkat 2 tingkat nasional. Presiden RI yang langsung memberikan penghargaan itu kepada Gubernur.”* (Informan 1, Ir. Eddy Santoso, MM)

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa PPID Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur mendapatkan apresiasi di tingkat nasional. Bahkan sempat menjadi peringkat pertama pada tahun 2010. Hal ini membuktikan bahwa kinerja dan peran PPID Dinas komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur cukup optimal. Namun, dalam perjalanan PPID Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur ada beberapa kendala, yaitu sebagai berikut: *“Tentu kendala ada. Kendala biasanya menyangkut perorangan saja. Mungkin karena kesibukan, lupa meng-*upload* atau terlambat merespon permintaan informasi.”* (Informan 1, Ir. Eddy Santoso, MM)

Berdasarkan penjelasan tersebut, PPID Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur terdapat kendala- kendala yang bisa menjadi penghambat dalam memerankan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelayan dan penyedia informasi publik bagi masyarakat. Dalam hal ini, PPID Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur telah menjalankan program kerja sesuai yang diamanatkan oleh undang- undang serta menggunakan media *website* sebagai sarana publikasi ke masyarakat. Mengenai harapan PPID Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur ke depan yang disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur yaitu sebagai berikut: *“Kami tentunya tidak berpuas diri dan akan meningkatkan seperti target PPID Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur di tahun 2016 menjadi juara 1. Kemudian PPID di SKPD kabupaten/kota juga lebih baik dari tahun sebelumnya. Sehingga secara umum, provinsi yang di dalamnya ada kabupaten/kota, kami lebih baik daripada provinsi yang lain.”* (Informan 1, Ir. Eddy Santoso, MM)

Peran PPID Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur bertanggung jawab di bidang layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik. PPID bertanggungjawab mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh informasi publik yang berada di badan publik. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik pada Pasal 6 dan 7. Berikut pernyataan mengenai hal tersebut. Berikut pernyataannya: *“Sesuai amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Dinas Kominformasi Provinsi Jawa Timur merupakan suatu badan publik*

pemerintah yang sudah menjadi kewajiban untuk melayani dan menyediakan informasi publik kepada masyarakat.

Jadi, secara kelembagaan PPID telah dibentuk baik di Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur selaku PPID Utama atau PPID Provinsi juga sebagai PPID Pembantu. PPID sudah melakukan program baik secara *online*, manual, dan berbagai bentuklainnya. Dan tanggapan masyarakat juga sudah positif. Hal ini dibuktikan dengan adanya perubahan paradigma atau *image* di masyarakat.” (Informan 2, Agus Muhanan, S.Sos, MM). Analisis peneliti pada pertanyaan pertama menerangkan bahwa Peran PPID Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur sudah memenuhi syarat dan menjalankan peraturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

### **Pernyataan *Informan* dari Masyarakat**

Pernyataan *informan* sangat berpengaruh terhadap penelitian ini. Berikut ini pernyataan keempat *informan*. *Informan* pertama yaitu Bella Adilah yang berdomisili di Sidoarjo dan kuliah di S1 Ilmu Komunikasi Universitas Airlangga Surabaya. Sedangkan, *informasi* kedua yang bernama Della Adilah yang berdomisili di Sidoarjo dan kuliah di S1 Sastra Inggris Universitas Airlangga Surabaya. Kedua *informan* menjawab pertanyaan tentang Peran PPID Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, berikut pernyataan *informan*: “Sebenarnya saya pribadi tidak tahu banyak mas tentang PPID. Namun, untuk Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur tahu sedikit mas. Jika PPID merupakan bagian dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur berarti memiliki tugas yang meliputi membuat kebijakan tentang komunikasi dan informasi di pemerintah untuk masyarakat. Kemudian berfungsi memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang hal-hal yang berkaitan dengan komunikasi dan informasi.” (Informan 4, Bella Adilah) “Sejujurnya saya tidak tahu apa itu PPID dan saya kurang mengerti tentang PPID karena terbilang masih awam sekali serta baru mengetahui PPID ya sekarang ini. Dari singkatannya saja saya tidak tahu.” (Informan 5, Della Adilah)

Analisis peneliti yang pertama dapat diketahui bahwa *informan* hanya mengetahui pengetahuan tentang PPID yang minim sekali. Bahkan, cenderung belum tahu mengenai eksistensi dan peran dari PPID Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. *Informan* hanya sebatas mengetahui tentang tugas pokok dan fungsi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur saja, belum mencakup ke PPID. Analisis peneliti yang kedua dapat disimpulkan bahwa *informan* belum tahu sama sekali tentang PPID Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Peneliti juga ingin mengetahui pendapat dari *informan* tentang kegiatan yang diselenggarakan oleh PPID Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur dalam rangka memberikan pelayanan dan penyediaan informasi publik. Dalam *informan* keenam dari mahasiswa S2 Komunikasi Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

“Sejauh yang saya ketahui tentang latar belakang dibentuknya PPID karena sudah diperintahkan oleh undang-undang. Terkait pelaksanaannya, saya kira sudah cukup optimal PPID Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur saya bisa katakan yang terbaik di antara SKPD yang lain. Buktinya, setiap bulan bahkan hampir tiap hari mesti ada yang bertanya terkait kebijakan publik bahkan hal-hal yang kecil misalnya perbaikan jalan, masyarakat mesti telepon

ke PPID Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur kemudian direspon dengan cepat. Hal tersebut menjadi bukti bahwa PPID Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur berjalan cukup optimal dan efektif." (Informan 6, Lukman Hakim,S.Sos)

Selain itu, peneliti ingin mengetahui pendapat mengenai peran PPID Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur dalam pelayanan dan penyediaan informasi publik. Dalam hal ini, peneliti memilih *informan* dari kalangan pengusaha multinasional. *Informan* tersebut bernama Ir. H. Rony Romandhawira, MM yang merupakan pengusaha yang bergerak di bidang *Electronic and IT Solution* dengannama PT. Mitra Wiratindo Indonesia. Berikut pernyataan *informan* ketujuh:

"PPID itu kan sasarannya banyak yang meliputi bidang agama, ekonomi, budaya, dan sosial. PPID masih perlu untuk mendekat dan lebih manfaat terhadap masyarakat. Contohnya, dalam hal usaha. PPID belum memberikan manfaat kepada pengusaha. Pengusaha masih percaya kepada *Google* dan sebagainya. Ini pun PPID jika hanya menyediakan layanan melalui *website*, saya kira belum bisa menyasar kepada masyarakat secara keseluruhan. Jika pelayanan melalui *website* berarti yang disasar ialah masyarakat yang melek dengan dunia informasi dan teknologi. Sementara itu, pelaku ekonomi dan bisnis di Indonesia itu hanya beberapa persen saja yang melek dengan dunia informasi dan teknologi. Kemungkinan 50% saja tidak ada, bahkan hanya 20% - 30% saja. Kemudian, yang 70% -80% itu belum tersentuh oleh pemerintah.Mungkin saja bisa dari koran atau informasi antar masyarakat. Saya sendiri sebagai pelaku bisnis, PPID baru kenal sekarang. Jadi, sosialisasi dan pendekatan ke masyarakat masih kurang sehingga masyarakat juga tidak tahu kemudian kontennya belum dapat memenuhi kebutuhan dari masyarakat sehingga merasa enggan." (Informan 7, Ir. H. Rony Romandhawira, MM)

## Pembahasan

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur dalam pelayanan dan penyediaan informasi publik hasilnya cukup bagus. Dalam hal ini, PPID Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur mendapatkan apresiasi di tingkat nasional. Bahkan sempat menjadi peringkat pertama pada tahun 2010. Hal ini membuktikan bahwa kinerja dan peran PPID Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur cukup optimal. PPID Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur memberikan bimbingan atau asistensi bagi PPID di SKPD kabupaten/kota untuk menjalankan amanah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008. Jadi, PPID Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur tetap memantau peran dan kinerja PPID di SKPD kabupaten/kota untuk menunjang kinerja di PPID di tingkat provinsi. Ke depannya Jawa Timur akan menjadi *role model* di tingkat nasional karena pembinaannya sampai ke kabupaten/kota (tingkat terbawah).

Peran PPID Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur sudah memenuhi syarat dan menjalankan peraturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas yang cukup kompleks. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, PPID berwenang untuk mengkoordinasikan setiap unit/satuan kerja di badan publik dalam melaksanakan pelayanan

informasi publik. PPID Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur telah melakukan tugas pokok dan fungsinya sebagai badan publik yang independen. Setiap badan publik wajib mengumumkan secara berkala informasi publik. Dalam hal adanya permohonan informasi publik, PPID bertugas mengkoordinasikan pemberian informasi publik yang dapat diakses oleh publik dengan petugas informasi di berbagai unit pelayanan informasi untuk memenuhi permohonan informasi publik.

PPID Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur telah melakukan langkah-langkah di antaranya dengan membuat SOP, Data Informasi Publik (DIP), klasifikasi, dan uji konsekuensi. Seluruh langkah tersebut merupakan syarat untuk menjadi informasi publik dan informasi publik yang dikecualikan sesuai dengan Undang- Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 19. PPI Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur sudah melakukan tahap-tahap yang dinamakan standar pelayanan dan penyediaan informasi publik.

PPID Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur telah menggunakan teknologi tepat guna. Hal ini sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaan masyarakat dalam mengakses informasi publik. PPID Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur mulai berperan dan punya andil untuk menyebarkan informasi publik di tengah- tengah masyarakat. Di era keterbukaan informasi publik yang luar biasa, masyarakat harus bisa menjadi masyarakat sipil (*civil society*) yang cerdas dan bijaksana dalam memilah, mengonsumsi, dan menyebarkan informasi. PPID mempunyai peranan penting di tengah- tengah masyarakat dalam mengakses informasi publik. Agar masyarakat tidak menjadi masyarakat yang gagap akan informasi publik. Dalam hal ini, PPID Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur telah memberikan pemahaman di beberapa SKPD se-Jawa Timur mengenai pentingnya PPID di SKPD masing-masing.

Dapat diketahui bahwa masyarakat dalam hal ini masyarakat intelektual (mahasiswa) hanya mengetahui pengetahuan tentang PPID yang minim sekali. Bahkan, cenderung belum tahu mengenai eksistensi dan peran dari PPID Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Masyarakat hanya sebatas mengetahui tentang tugas pokok dan fungsi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur saja, belum mencakup ke PPID. Masyarakat belum mengetahui kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh PPID Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Masyarakat hanyalah mengetahui terkait peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, bukan dari sisi PPID.

Secara umum, kelebihan dari PPID Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur masih belumdimgerti dan dipahami oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi dari PPID Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur terkait tugas dan fungsinya sebagai badan publik dalam memberikan pelayanan dan penyediaan informasi publik bagi masyarakat. Masyarakat yang mengetahui dan memahami mengenai keberadaan PPID Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur hanyalah segelintir saja. Masyarakat yang mengetahui dari mahasiswa yang pernah mendapat sosialisasi dari PPID Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dalam penelitian Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur dalam Pelayanan dan Penyediaan Informasi Publik, peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Peran PPID Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur sudah memenuhi syarat dan menjalankan peraturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

PPID Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur telah melakukan tugas pokok dan fungsinya sebagai badan publik yang independen. Setiap badan publik wajib mengumumkan secara berkala informasi publik. Dalam hal adanya permohonan informasi publik, PPID bertugas mengkoordinasikan pemberian informasi publik yang dapat diakses oleh publik dengan petugas informasi di berbagai unit pelayanan informasi untuk memenuhi permohonan informasi publik.

PPID Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur telah melakukan langkah-langkah di antaranya dengan membuat *Standart Operational Procedure* (SOP), Data Informasi Publik (DIP), klasifikasi, dan uji konsekuensi. Seluruh langkah tersebut merupakan syarat untuk menjadi informasi publik dan informasi publik yang dikecualikan sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 19.

Peran PPID Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur dalam pelayanan dan penyediaan informasi publik sejauh ini telah mencapai hasil yang cukup bagus dan memuaskan. Hal ini dibuktikan pada 2015, PPID Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur menjadi peringkat ke 2 di tingkat nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdurrachaman, Oemi. 2001. *Dasar- Dasar Public Relations*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Apriadi Tamburaka. 2012. *Agenda Setting Media Massa*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Effendy, Onong Uchjana. 2007. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktik*. Bandung : PT.Remaja Rosdakarya, Hal:32
- Grunig dalam Ruslan Rosady. 2006. *Manajemen Public Relations Konsep dan Aplikasinya*. Jakarta: Raja Grafindo. Hal. 60
- Iriantara, Yosol. 2007. *Community Relations Konsep dan Aplikasinya*. Bandung : PT.Remaja Rosdakarya Offset. Hal:133
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif (edisi ketujuh)*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, Deddy. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

- Nurudin. 2007. *Pengantar Komunikasi Massa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nazir, Mohammad. 1999. *Meiode Penelitian*. Jakarta: Erlangga.
- Ruslan, Rosady. 2012. *Manajemen Public Relations & Media Komunikasi*. Jakarta. PT Rajagrafindo Persada.
- Ruslan, Rosady. 2002. *Manajemen Humas dan Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rakhmat, Jalaludin. 2001. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sirajuddin, dkk. 2011. *Hukum Pelayanan Publik: Berbasis Partisipasi & Keterbukaan Informasi*, Malang, Setara Press.
- Soemirat, Soleh dan Elvinaro Ardianto. 2010. *Dasar-Dasar Humas*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Stoner, James A.F. 2006. *Manajemen Jilid I Edisi Keenam*. Jakarta: Salemba Empat.

### Non-Buku

- Arief Mudatsir Mandan, Sekilas tentang UU KIP, hal 14.
- BAB IV Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Bambang Mudjiyanto, 2005, *Pelayanan dan Umpan Balik Informasi kepada Publik: Studi pada Humas Lembaga Informasi Nasional*, Tesis, Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia.
- Ketua Komisi Informasi, dikutip dari artikel "UU Keterbukaan Informasi Publik, Tak Siap, Tapi Harus Jalan Terus," <http://www.antikorupsi.org>, (13 Oktober 2015).
- Kemendagri, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (on line)*, 2011
- Modul Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Informatika. Hal: 4.
- No Name. Diakses dari <http://www.kemendagri.go.id/ind>, (14 Oktober 2015).
- No Name. Diakses dari [www.jatimprov.go.id](http://www.jatimprov.go.id) (pada 21 Januari 2016)
- Pedoman Umum Pelayanan Informasi Publik PPID Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur
- Periksa Pratikno, dan tim. *Kajian Implementasi Keterbukaan Informasi Publik dalam Pemerintahan Lokal Pasca Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008* (Yogyakarta: FISIPOL UGM dan Tita Foundation, 2012), hal. 2-3
- Pasal 2 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Sekretariat Negara, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (on line), 2010, [www.setneg.go.id](http://www.setneg.go.id) (12 Oktober 2015).

Terry, George R. 2003. *Prinsip-prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Laksana, Jogjakarta, 2012.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Laksana, Jogjakarta, 2012, hal.102-110. [www.kominfo.jatimprov.go.id](http://www.kominfo.jatimprov.go.id) (pada 21 Januari 2016)